

---

# PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL DI SUMBAWABERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2012 MENGENAI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL (STUDI KASUS : KONFLIK ANTARA SUKU SAMAWA DENGAN SUKUBALI TAHUN 2013)

Oleh:

Fauziah Aulia Rishanti<sup>1)</sup>, Puguh Santoso<sup>2)</sup>, Anang Puji Utama<sup>3)</sup>

<sup>123</sup>Fakultas Kemanan Nasional, Universitas Petahanan Republik Indonesia

<sup>1</sup>Email: fauziyahrishanti@gmail.com

<sup>2</sup>Email: puguh28838@yahoo.com

<sup>3</sup>Email: [anangpu19@yahoo.co.id](mailto:anangpu19@yahoo.co.id)

## Abstrak

Konflik sosial antara suku samawa dan suku bali di Sumbawa terjadi secara berulang dalam jangka waktu yang cukup lama namun konflik tersebut semakin bereskalasi hingga terjadi kekerasan masa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab konflik dengan menggunakan kerangka konsep *multi-causal role model*. Analisis dilakukan dengan melihat dinamika konflik yang terjadi, dari mulai konflik pada tahun 1980, 2003 dan 2013. Selanjutnya dilakukan analisis untuk melihat tingkatan eskalasi konflik berdasarkan teori eskalasi konflik Glasl serta upaya penyelesaian konflik berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Metode kualitatif dan pendekatan studi kasus digunakan sebagai desain penelitian. Berdasarkan pada analisis dalam penelitian, konflik yang berulang antara suku samawa dan suku bali disebabkan oleh faktor struktural yang tidak ditangani secara tuntas pada periode awal munculnya konflik, sehingga berpengaruh terhadap perubahan penyebab konflik menjadi konflik antar suku. Penanganan konflik dilakukan dengan intervensi kekuasaan oleh Pihak Polisi dan melibatkan unsur TNI untuk membantu penyelamatan dan perlindungan korban serta untuk mencegah kembali terjadinya konflik.

**Kata Kunci: Konflik Sosial, Dinamika Konflik, Penanganan Konflik.**

## A. PENDAHULUAN

Ketika Indonesia mengalami transisi dari otoritarianisme menuju demokrasi, kekerasan kolektif terjadi di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia (Bertrand, 2004; Maso'ed dkk, 2000). Kekerasan bermula dari konflik-konflik yang tidak dapat diselesaikan dalam keluarga, masyarakat, bernegara ataupun dalam hubungannya dengan negara lain. Era reformasi pun disambut dengan meningkatnya konflik sosial di beberapa daerah seperti konflik antar-agama yang terjadi di Ambon, Maluku, sepanjang 1999, konflik etnis yang terjadi di Sampit, Kalimantan Tengah pada 2001, konflik etnis di Aceh, kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah di NTB, dan bentuk kekerasan lainnya di Indonesia. Konflik sosial yang terjadi ini sebagian besar dilatar belakangi oleh Suku, Agama, dan Ras (SARA) yang biasanya muncul dari adanya gesekan kepentingan dalam proses interaksi baik antar individu maupun kelompok.

Indonesia sebagai negara yang multikultur dan hidup dalam pluralitas orientasi dan nilai, sangat rentan mengalami benturan kepentingan hingga menimbulkan konflik. Karakteristik masyarakat multikultural memang menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk mengelola perbedaan demi terciptanya rasa aman bagi warga negaranya. Pasca tahun 2003 konflik sosial berskala tinggi dapat diselesaikan, diantaranya konflik di Aceh, Ambon Maluku, Kalimantan, dan Sulawesi, sehingga tingkat konflik kekerasan yang menyebabkan kematian mengalami penurunan secara signifikan hingga tahun 2008. Sementara sebagian konflik lain tetap terus berlanjut dengan pola baru yang juga tersebar di seluruh wilayah berkaitan isu dengan perebutan sumber daya, masalah politik, dan yang terbesar adalah konflik berbasis pada agama dan antar etnis (Muliono, 2020).

Dari sekian banyak konflik atas nama SARA di Indonesia, salah satunya adalah konflik yang terjadi di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Konflik tersebut terjadi antar etnis Samawa dengan etnis Bali sebagai warga pendatang. Masyarakat Sumbawa dikenal sebagai masyarakat yang heterogen karena dihuni oleh penduduk dari berbagai suku, etnis, bahasa dan agama yang memiliki pembawaan adat-istiadat serta sistem hidup yang berbeda-beda. Kondisi ini adalah salah satu modal utama yang jika disalahgunakan akan bisa berdampak negatif dengan munculnya sentiment-sentimen dan konflik komunal yang berujung bisa merusak sistem kehidupan bermasyarakat.

Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu Kabupaten yang masuk dalam zona rawan konflik. Beberapa potensi konflik di Sumbawa yakni konflik politik yang disebabkan oleh kekecewaan pada pelaksanaan Pemilu, konflik yang terkait dengan sumber daya seperti konflik pertambangan. Menurut data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, mencatat bahwa Sumbawa masuk dalam kategori daerah rawan konflik dari 22 daerah yang juga ditetapkan oleh pemerintah terkait pertambangan ([www.radarbangka.co.id](http://www.radarbangka.co.id), 2017). Begitu juga dengan adanya kondisi kerentanan akan konflik sosial-budaya dan ekonomi akibat daerah tersebut masih masuk dalam kategori daerah tertinggal.

Kekerasan antar-etnis di Sumbawa terjadi pertama kali pada tahun 1980, selang beberapa dekade kemudian konflik memuncak kembali pada tahun 2003, lalu terjadi kembali pada tahun 2013. Dinamika konflik yang terjadi di Sumbawa tersebut menunjukkan adanya rentan waktu yang cukup lama dari satu eskalasi ke eskalasi berikutnya. Hal ini menarik untuk dikaji karena menandakan bahwa konflik belum dapat diselesaikan secara tuntas hingga ke akar masalahnya. Manajemen konflik seharusnya hadir

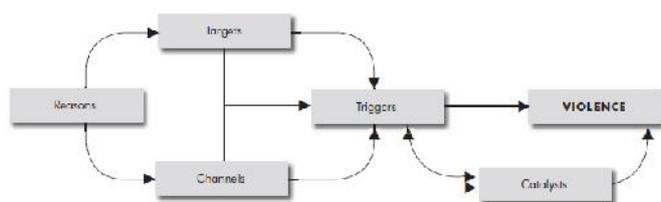
untuk mengatur berbagai perbedaan kepentingan dalam hidup manusia. Manajemen konflik yang diimplementasikan dengan baik dapat membantu dalam melakukan kegiatan penanganan yang positif dan konstruktif terhadap konflik (Ichsan Malik, 2007).

Terjadinya kekerasan dan konflik yang berkelanjutan ini umumnya menunjukkan bahwa sering kali konflik dibiarkan terjadi atau tidak dapat ditangani dengan baik. Hal ini berakibat pada tidak tercapainya perdamaian positif karena ketiadaan resolusi konflik atau rekonsiliasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan mengkaji mengenai apa penyebab terjadinya konflik etnis di Sumbawa serta bagaimana upaya penanganan konflik yang mengacu pada Undang-Undang No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Analisis akan dilakukan dengan menggunakan kerangka konsep multi-kausal role model untuk melihat akar permasalahan konflik secara holistik sehingga mampu bahan rujukan untuk menciptakan resolusi konflik serta melakukan upaya pencegahan khususnya bagi konflik di Sumbawa, dan bagi kasus-kasus serupa lainnya di wilayah Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2012). Sedangkan studi kasus (*case study research*) adalah sebuah model dalam penelitian kualitatif yang berupa penyelidikan mendalam dari berbagai macam informasi terkait beberapa unit atau kasus untuk satu periode atau antar beberapa periode waktu majemuk. Kasus tersebut dapat berupa individu,

kelompok, organisasi, pergerakan, peristiwa, atau unit geografis (Neuman, 2017). Studi kasus dalam penelitian ini menganalisa suatu peristiwa konflik antar suku Samawa dan suku Bali yang terjadi pada tahun 2013, namun peneliti juga mengurai dinamika konflik pada periode sebelumnya yakni kasus pada tahun 1980 dan 2003 untuk mendapat analisa yang lebih dalam mengenai akarkonflik dan unsur-unsur lainnya sesuai dengan konsep dan teori yang digunakan. Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan studi literatur dengan mengumpulkan dokumen, jurnal, artikel, dan surat kabar yang memuat informasi yang dibutuhkan terkait dengan penelitian sebagai sumber data utama.



Gambar 1; Instrument Analisa Konflik *Multi-Causal Role Model*

Terdapat enam unsur yang dapat membantu dalam menganalisa konflik dengan menggunakan multi-causal role model, diantaranya (Mason & Rychard, 2005):

Unsur pertama yakni **reasons** - Alasan, dasar atau akar penyebab dan struktural faktor dari konflik, dirasakan oleh aktor sebagai "Masalah sejarah". Alasan yang terkait dengan kepentingan dan kebutuhan pihak yang berkonflik, dan juga persepsi mereka tentang sejarah, trauma, ketidakadilan dll, akar konflik ini mempengaruhi isi dan dinamika konflik. Unsur kedua yakni **targets** - Tujuan dari pihak yang berkonflik, apa yang menjadi tema konflik, posisi dan kepentingan dari pihak tersebut. Target mempengaruhi isi konflik. Unsur ketiga yaitu **channels** - Saluran ini biasanya menggunakan isu politik, sosial, ekonomi atau kondisi nasional, dimana

### 1.1 Multi Causal Role Model

Multi Causal Role Model merupakan salah satu analisis konflik yang memfokuskan pada penyebab, kualitas alasan yang berbeda, pemicu, saluran, katalis, dan target. Muatan dan aktor, dinamika dan struktur juga dipertimbangkan. Model ini membedakan faktor yang struktural dengan yang berorientasi terhadap aktor dengan menganalisa pendekatan sistim dan aktor. Tujuannya adalah untuk melacak mekanisme sebab-akibat, pola, membedakan antara kualitas dan berbagai faktor yang berbeda yang mengarah kepada konflik; menganalisa sebab maupun dinamika konflik; Memfasilitasi *entry point* untuk proses transformasi konflik dan membedakan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang (Mason & Rychard, 2005).

sekelompok orang membentuk identitas tertentu. Saluran mempengaruhi konten dan dinamika konflik. Saluran sering tidak berkaitan langsung dengan akar penyebab konflik. Unsur keempat yaitu **triggers**-memicu tingkatan baru dari konflik. Pemicu mempengaruhi dinamika konflik. Unsur kelima yaitu **katalis**- mempengaruhi tingkat, intensitas dan durasi konflik. Katalis dan **Channels** dapat mengubah alasan dari waktu ke waktu, misalnya ketika dua kelompok mulai dengan bertempur atas sumber daya, dan berakhir dengan isu etnis.

### 1.2. Teori Eskalasi Konflik Glasl

Model eskalasi konflik ini dicetuskan oleh Friedrich Glasl. Teori ini digunakan untuk menganalisis posisi sebuah eskalasi dari yang sederhana menjadi lebih kompleks. Dengan melihat

tahapan eskalasi konflik maka dapat memudahkan dalam menentukan upaya penyelesaian konflik. Terdapat sembilan tahapan pada teori eskalasi Glasl, yakni *Debate, polemics; Action, not words; Images*

*coalitions; Lost of face; Strategies of threat; Limited destructive blows; Fragmentation; Together into the abyss* (Glasl, 1999). Tahap-tahap tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5	Tahap 6	Tahap 7	Tahap 8	Tahap 9
Win-lose	Win-win	Win-win	Win-lose	Win-lose	Win-lose	Win-lose	Win-lose	Win-lose
Ketegangan dan Pertentangan	Perundingan dalam suasana kerjasama, sopan dan perilaku	Perundingan mulai hilang	Konflik	Memulai adok pihak lain dan menyebarkan publik	Ancaman dan ancaman balik	Perundingan dan ancaman	Perundingan dan ancaman	Perundingan dan ancaman
Kerjasama antar kelas dan para persaingan	Perundingan untuk mendominasi kelas tanpa persaingan	Perundingan antar kelas dari kerjasama	Self help, propaganda, propaganda sumbu, menguat	Rebalan sumbu, kekerasan, Mulai lawan kelas lain, target di samping (menjijikan dan adarungun)	Ultimatum, ancaman, pemerasan, pemerasan, sanksi, Ancaman	Menyusut, mulai menjadi barang, mental, sosial dan ekonomi	Ketahanan, mulai mental, sosial dan ekonomi	Tidak ada jalan, kerusakat tidak bisa dihindari, Kerusakan dan kerugian, Menegaskan eksistensi kemanusiaan
Harapan awal: Win-win			Win-lose			Win-lose		
Strategi untuk pihak ke-3 intervensi		Negosiasi		Mediasi		Arbitrasi/Adjudikasi		Intervensi kekuasaan
Fasilitasi, dengan fasilitator		Proses Konsultasi oleh pihak ke-3 yang netral		Mediasi		Arbitrasi/Adjudikasi		Intervensi kekuasaan

Gambar 2; Tahapan eskalasi konflik Glasl.

**C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**2.1 Dinamika Konflik antar Suku Samawa dan Suku Bali.**

Konflik di Sumbawa sudah berlangsung lama dan beberapa kali mengalami eskalasi. Sumbawa merupakan kabupaten yang memiliki posisi cukup strategis yaitu terletak pada segitiga emas kawasan pariwisata antara pulau Bali, Lombok dan pulau Komodo. Kabupaten Sumbawa memiliki kekayaan alam berupa lahan pertanian dan peternakan dan telah ditetapkan sebagai lumbung padi dan daerah pengembangan ternak di NTB. Di samping itu, juga memiliki kekayaan hutan, flora dan fauna, mineral, pertambangan emas dan tembaga, industri dan sumber daya kelautan dengan Panjang pantai mencapai 900 km (Ardiansyah, 2010). Potensi Kabupaten Sumbawa yang begitu besar menjadi daya tarik bagi para pendatang khususnya bagi para etnis Bali. Kehadiran etnis Bali di kabupaten Sumbawa dilatarbelakangi oleh faktor migrasi, transmigrasi, dan karena keterdesakan oleh kondisi ekonomi dan geografis di daerah asal, dengan

motivasi ingin merantau, meningkatkan taraf hidup, mencari kerja, menjadi petani, peternak, pedagang/bisnis, mutasi jabatan pegawai, pejabat, dan sebagainya. Dinamika konflik di Sumbawa akan penulis bagi menjadi tiga periode berdasarkan beberapa rentetan peristiwa konflik yang terjadi antara tahun 1980, 2003, dan 2013.

**Konflik Pada periode 1980**

Sejak kedatangan etnis Bali sebagai pendatang di wilayah Sambawa, mereka dapat beradaptasi dengan cepat, terutama dalam memperbaiki taraf kehidupan ekonomi-sosial. Etnis Bali berhasil unggul dalam mengakses sumber-sumber ekonomi, serta jabatan-jabatan penting di birokrasi seperti di sektor pemerintahan/swasta/BUMN. Keberadaan etnis Bali kemudian semakin mendominasi dalam kehidupan masyarakat Sumbawa, di mana warga etnis Bali mulai menampilkan perilaku dan aktivitas sosial budaya dan adat Bali yang dianggap mencolok oleh warga etnis Samawa (Ardiansyah, 2010). Hal inilah yang kemudian memunculkan kecemburuan sosial hingga

melahirkan kesenjangan sosial antaretnis Samawa dan etnis Bali. Etnis Samawa merasa diperlakukan secara tidak adil oleh pemerintahan pada masa itu di Era Orde Baru yang pada akhirnya menimbulkan prasangka di kalangan etnis Samawa bahwa "Sumbawa telah dikuasai oleh etnis Bali" (Salehuddin, 20014).

Dari faktor kesenjangan ekonomi dan sosial inilah yang memicu masyarakat setempat melakukan pergerakan, terutama pergerakan dari para elit politik lokal untuk melakukan perubahan pada struktur birokrasi pemerintahan di Sumbawa yang berujung pada konflik (Salehudin, 2014). Awalnya konflik dipicu oleh perkelahian pemuda Bali dengan pemuda dari etnis Samawa. Konflik pun bereskalasi sampai kepada terjadinya penembakan oleh oknum pejabat/aparat yang mengakibatkan korban luka dan meninggal dunia. Peristiwa ini menjadi pemicu terjadinya konflik secara meluas dan puncaknya terjadi pada tanggal 17 November 1980 terjadi amuk masa secara besar-besaran di seluruh kota maupun di beberapa kecamatan di Sumbawa dan menyebabkan banyak korban jiwa dan korban materi pada saat itu (Ardiansyah, 2010). Momentum ini dimanfaatkan oleh kelompok oposisi pemerintah yang berkepentingan menjadi Bupati Sumbawa periode berikutnya. Isu lainnya yang dikaitkan dengan aksi amuk masa ini yaitu maraknya kasus kawin lari yang terjadi sepanjang tahun.

### **Konflik Pada Periode 2003**

Konflik yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat Sumbawa di tahun 2003 bermula dari meninggalnya seorang Mahasiswa Universitas Samawa, bernama Mustakim dalam sebuah kecelakaan lalu lintas. Korban langsung dibawa ke Unit Gawat Darurat RSUD Sumbawa, tetapi korban kemudian dijemput oleh enam anggota Polres Sumbawa dan ditahan. Setelah dua jam

ditahan, korban kemudian tewas. Kematian korban menjadi pemicu kerusuhan yang mengakibatkan satu orang tewas dan beberapa lainnya mengalami luka-luka, lalu terjadi bentrokan dengan Polisi dan menjaral ke pengrusakan rumah dinas Kapolres Sumbawa, sebuah pos polisi, dan tiga mobil juga dirusak oleh massa saat itu (Kusumaputra, 2013). Unjuk rasa terjadi selama dua hari berturut-turut hingga menewaskan Gathan dan belasan luka-luka akibat tembakan Polisi (Tempo News Room, 2003).

Faktor yang menjadi determinan yang menyebabkan konflik sosial 2003 terjadi di kota Sumbawa adalah ketidak profesionalan aparat pemerintah, utamanya aparat kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara keamanan negara. Terlebih lagi, sebelum aksi masa terjadi, beredar kabar yang memprovokasi bahwa kematian Mustakim disebabkan karena penganiayaan oleh oknum Polisi. Berita provokasi tersebut sampai dan diterima oleh kelompok rentan yakni para mahasiswa. Beredarnya kabar bahwa pelaku penganiayaan berasal dari etnis Bali menjadi faktor yang mempercepat (akselerator) terjadinya eskalasi konflik.

### **Konflik Pada Periode 2013**

Selang 10 tahun sejak kerusuhan 2003, Sumbawa mengalami kejadian yang serupa. Konflik kali ini terjadi bermula dari kasus individu yang merembet menjadi kekerasan mengatasnamakan isu SARA. Insiden berawal dari beredarnya isu pemerkosaan dan penganiayaan terhadap Arniyati, seorang mahasiswi Universitas Samawa dan merupakan warga Labuan Badas Sumbawa oleh seorang Polisi dari suku Bali. Namun fakta yang sebenarnya bahwa Arniyati meninggal akibat kecelakaan motor saat berboncengan dengan pacarnya yang seorang Polisi, Brigadir I Gede Eka Swarjana. Kejadian

tersebut terjadi pada 19 Januari 2013, sekitar pukul 23.00 waktu setempat keduanya pulang dari tempat hiburan malam di kawasan pantai Batu Gong. Sekitar 15 kilometer dari Kota Sumbawa Besar, Arniyati dan Eka mengalami kecelakaan. Arniyati mengalami luka di bagian kepala, sedangkan Eka mengalami patah tulang iga sebelah kanan. Arniyati tidak tertolong dan meninggal setelah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Sumbawa (Rosarians, 2013).

Isu pemerkosaan dan penganiayaan tersebut dengan cepat menyebar luas ke seluruh pelosok kabupaten Sumbawa. Terlebih lagi, berita meninggalnya Arniyati menyebabkan sekelompok mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di Polres Sumbawa mendesak pihak kepolisian agar segera mengusut kasus yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa tersebut. Kerusuhan diwarnai dengan aksi perusakan dan penjarahan oleh etnis Samawa terhadap etnis Bali. Dalam hitungan jam massa yang datang dari berbagai kecamatan bergabung dengan massa lainnya berkumpul di pusat kota untuk melakukan pembakaran 35 rumah warga asal Bali, dan perusakan puluhan rumah lainnya, satu tempat ibadah (Pura) serta unit toko dan dua swalayan juga dijarah dan dibakar. Selain itu, aksi kekerasan ini menyebabkan empat mobil dan tujuh sepeda motor dibakar, satu unit hotel (Hotel Tambora) dibakar dan satu bengkel dirusak dan dijarah. Tujuh sepeda motor lainnya dirusak, enam unit toko dibakar, dan 142 unit kios di Pasar Seketeng, Kecamatan Sumbawa, juga dibakar. Akibat aksi ini, sebanyak 200 warga diungsikan ke Markas Polres Sumbawa dan 300 orang di Markas Komando Distrik Militer Sumbawa (Rosarians, 2013).

## 2.2 Analisis Konflik Etnis Sumbawa

Setelah melakukan pengkajian dari berbagai rentetan konflik yang mewarnai

kehidupan sosial masyarakat Kota Sumbawa, mulai dari peristiwa konflik 1980, 2003 dan 2013, terlihat bahwa konflik kerap kali disebabkan oleh adanya kesalahan dalam menerima informasi yang berlanjut pada prasangka antar kelompok etnis dan akhirnya memicu munculnya provokasi yang berujung pada terjadinya aksi kekerasan. Maka dalam menganalisis dinamika konflik ini, terlebih dahulu harus dipisahkan antara akar konflik, pemicu (trigger) serta kelompok yang menjadi sasaran tindakan kekerasan. Ada beberapa hal yang menjadi determinan penyebab munculnya konflik antar etnis di Kota Sumbawa. Berdasarkan kerangka multi-causal role model, konflik Sumbawa dapat dianalisa dengan memperhatikan unsur dalam multi-causal role model, berikut:

### a) Reason – akar konflik

Sumber konflik yang terjadi di Indonesia seringkali disebabkan karena berbagai sumber, tidak hanya bertumpu pada satu sumber konflik saja, melainkan memiliki sebab-sebab ganda. Dari pengalaman empiric di berbagai daerah di Indonesia, dapat dinyatakan bahwa sumber konflik sosial di Indonesia ada lima, faktor structural, faktor kepentingan, faktor nilai-nilai adat, faktor data dan faktor hubungan sosial-psikologis (Ichsan Malik, 2017). Berdasarkan hasil temuan penulis, penyebab konflik antar suku Samawa dengan suku Bali diantaranya

Pertama, faktor structural. Konflik terjadi akibat adanya ketimpangan dalam melakukan akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi. Pada konflik pertama yang terjadi tahun 1980, dipicu oleh adanya kesenjangan dalam memperoleh sumber daya ekonomi termasuk pekerjaan. Akibatnya, etnis Bali mendominasi dalam bidang perdagangan, pertanian, kepemilikan lahan, pemukiman, rumah, toko, kios di tempat-tempat strategis bahkan hingga di jalan raya. Pihak yang berkuasa dan memiliki wewenang formal untuk melakukan kebijakan umum pun

lebih memiliki peluang untuk menguasai akses dan melakukan kontrol sepihak terhadap pihak yang lain. Hal ini didukung oleh elite-elite kekuasaan yang dominan dijabat oleh etnis Bali sehingga mereka sangat mudah mendapatkan akses ekonomi, seperti kepemilikan lahan permukiman, lahan pertanian, tempat usaha, dan kios di pasar. Akibatnya warga etnis Samawa merasa terdesak dalam beberapa mata pencaharian dan lapangan kerja (Iskandar, 2009).

Pada akhirnya, etnis Samawa merasakan adanya ketidakadilan yang berujung kekecewaan. Akibat dari dikuasainya sumber-sumber ekonomi oleh etnis Bali, masyarakat dari etnis Samawa merasa kehilangan lapangan pekerjaan serta menyempitnya ruang gerak mereka sehari-hari. Hal itu berdampak pada berkurangnya penghasilan masyarakat setempat yang tidak hanya menimbulkan kerugian secara materi, tetapi juga menyebabkan suku Samawa merasa kehilangan identitas dan hargadiri. Selain ekonomi, faktor structural lainnya timbul dari aspek sosial-politik yakni adanya perebutan sumber kekuasaan akibat distribusi kekuasaan yang tidak merata. Hal ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat sejak era Orde Baru dengan menetapkan pola kebijakan pusat, dimana pejabat-pejabat yang akan menduduki jabatan-jabatan teras dan strategis dikirim atau didrop dari pusat. Etnis Bali pun banyak menduduki jabatan-jabatan penting di pemerintahan, swasta dan BUMN, diantaranya sebagai anggota Muspida, ketua pengadilan negeri, kepala kejaksaan negeri, danres, kepala PLN, kepala Telkom, kepala bank, kepala agraria, dan kepala asuransi, pejabat swasta, BUMN, dan lain-lain (Iskandar, 2009). Hal itu menyebabkan timbulnya kecemburuan dari etnis Samawa.

Pada kenyataannya disebutkan bahwa keberhasilan etnis Bali menguasai sumber-sumber ekonomi dan menduduki posisi strategis di

pemerintahan tidak lepas dari karakter mereka yang memiliki etos kerja serta motivasi yang tinggi dibanding etnis Samawa. Secara psikologi, masyarakat yang berasal dari tanah rantau akan memiliki kemampuan beradaptasi yang lebih tinggi dibandingkan penduduk asli (lokal) sehingga daya juang dan insting untuk bertahan hidup akan terus terasah dan tidak jarang dari mereka yang mampu lebih unggul dari penduduk asli.

Kedua, Faktor nilai. Sumber konflik dari nilai-nilai adat ini disebabkan oleh sistem-sistem kepercayaan yang tidak bersesuaian. Konflik akibat nilai muncul Ketika orang berusaha untuk memaksakan suatu sistem nilai kepada yang lain, atau mengklaim suatu sistem nilai yang eksklusif dimana didalamnya tidak mungkin ada percabangan kepercayaan (Malik, 20017). Antara etnis Samawa dan Bali jelas memiliki perbedaan budaya yang jauh. Etnis Bali yang menganut ajaran agama Hindu dan etnis Samawa menganut ajaran Islam. Keduanya memiliki adat dan nilai-nilai yang berbeda, bahkan dalam beberapa hal nilai-nilai antar kedua etnis tersebut bertentangan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti praktik kawin lari atau “mekik” yang sering dilakukan oleh pemuda Bali yang ingin menikah dengan wanita dari etnis Samawa. Dari sudut pandang budaya Bali, “mekik” ini sah saja dilakukan, tetapi bagi etnis Samawa hal itu menyalahi norma dan tidak sesuai dengan budaya yang mereka anut. Selain itu, ada pula pelaksanaan upacara adat, seperti “ngabendan” prosesi upacara keagamaan lainnya, yang selalu diiringi arak-arakan keliling kota, judi, dan minuman keras. Semua ini dianggap oleh etnik Samawa telah melampaui batas-batas tradisi, adat, dan agama Islam yang mayoritas dianut oleh etnik Samawa. Adanya benturan budaya antar kedua etnis ini menjadi faktor dominan yang sering digaungkan untuk membuat konflik semakin meningkat.

Dalam penampilan identitas fisik maupun nonfisik, etnik Bali berbeda dengan etnik Samawa, termasuk dalam menentukan ciri kelompoknya masing-masing, yaitu dalam pengakuan sosial mereka masing-masing memiliki perbedaan dalam nilai-nilai budaya, termasuk nilai-nilai keagamaan dan bahasa (Narroll, 1964; Barth, 1969). Sukusamawa mengidentifikasi dirinya sebagai suku asli Sumbawa yang menjadi korban atas ketidakadilan dalam struktur masyarakat di tanah moyang sendiri. Identifikasi itu juga dilakukan atas dasar kepentingan dan agama yang sama, yaitu Islam. Hal ini menjadi meluas diikuti oleh kelompok etnis lain yang merasa memiliki satu identitas. Di sisi lain warga etnis Bali yang diidentifikasi sebagai masyarakat pendatang, dan non-Islam dianggap sebagai kelompok luar (out group) dan ancaman bagi eksistensi suku Samawa.

Ketiga, faktor minimnya akses informasi. Konflik terkait data terjadi ketika orang kekurangan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang bijaksana, mendapat informasi yang salah, tidak sepatutnya mengenai apa saja informasi yang relevan, menerjemahkan informasi dengan cara yang berbeda atau memakai tata cara pengkajian yang berbeda. Beberapa konflik akibat data terjadi karena kurangnya komunikasi di antara orang-orang yang berkonflik (Ichsan Malik, 2017). Dari tiga peristiwa kekerasan besar yang terjadi di Sumbawa, terdapat hal serupa yang selalu terulang yakni adanya provokasi melalui penyebaran informasi yang keliru. Para provokator ingin menciptakan suasana tidak kondusif pada masyarakat kota Sumbawa. Informasi tersebut dibuat untuk mengkampanyehitamkan kedua etnis dengan tujuan menjatuhkan pemerintah/pemangku kebijakan/Polisi yang pada saat itu didominasi oleh etnis Bali (Iskandar, 2010). Dalam hal ini berarti terdapat kepentingan dari kelompok tertentu yang menginginkan

perubahan dalam struktur dalam pemerintahan daerah.

Masyarakat Sumbawa khususnya suku Samawa pada dasarnya merupakan kelompok rentan yang mudah terprovokasi oleh isu-isu kekerasan yang melibatkan etnis Bali. Analogi ini mirip dengan daun kering yang mudah terbakar. Walaupun dengan api yang kecil, hasil api tersebut dapat sangat merusak apalagi ditambah dengan angin yang panas. Dalam konsep Kerangka Dinamis Pencegahan Konflik dari Ichsan Malik, daun kering sama halnya dengan pemicu konflik, sedangkan api merupakan faktor-faktor mendasar penyebab terjadinya konflik. Selanjutnya angin disini adalah akselerator atau hal yang mempercepat terjadinya konflik, seperti disisipkannya isu-isu agama, atau etnis yang menjadi sangat sensitive di wilayah tertentu. Maka adanya keterbatasan akses terhadap informasi yang benar dapat berujung pada munculnya berita-berita yang memprovokasi, terlebih lagi bila berita tersebut berkaitan dengan etnis Bali dan Samawa yang pada kehidupan sosial kerap kali tidak harmonis, maka dapat dengan cepat menimbulkan aksi kekerasan.

#### **b) Target**

Tujuan yang ingin dicapai dari pihak yang berkonflik yakni ingin adanya pemerataan terhadap distribusi ekonomi dan kekuasaan, mengingat faktor mendasar terjadinya konflik adalah karena masyarakat etnis Samawa kehilangan akses terhadap lapangan pekerjaan, lahan permukiman, lahan pertanian, dan tempat usaha. Kondisi ini berbanding terbalik dengan yang dialami suku Bali, mereka mendominasi sektor pemerintahan di Sumbawa. Faktor ini kemudian direspons oleh kelompok yang oposisi terhadap pemerintah untuk menciptakan kondisi anarki, dengan sasaran yakni etnis Bali serta sasaran kambing hitam adalah para elit

kaderpimpinan Sumbawa yang dibuat seolah-olah sebagai pihak yang bertanggung jawab atau pelaku.

#### c) Channel/Saluran

Mengacu pada target dari konflik yaitu menyasar etnis Bali dengan faktor struktural sebagai akar konflik, maka masyarakat di Sumbawa terfragmentasi menjadi dua kelompok berdasarkan identitas etnis dan agama (tekhno-religio identification). Etnis Samawa kemudian mengidentifikasi kelompoknya sebagai pihak yang dirugikan karena kehilangan akses terhadap sumber daya, sedangkan mereka memandang etnis Bali sebagai kelompok di luar mereka (out group) yang menggeser posisi mereka dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Pada kondisi ini, menguatnya identitas etnis sejalan dengan meningkatnya rasa solidaritas dan kesadaran dalam kelompok suku Samawa, dan pada akhirnya mempengaruhi dinamika konflik.

Adanya identitas etnis-keagamaan ini menjadi saluran (channel) yang dapat mengaburkan penyebab sebenarnya dari konflik. Seperti halnya ketika terjadi insiden tunggal yang negatif, ini dipandang sebagai bukti nyata dari kebobrokan pihak lawan. Kondisi ini dapat dilihat pada kasus tahun 2003 dan 2013, ketika konflik dipicu oleh berita penganiayaan terhadap pemuda Samawa oleh Polisi (etnis Bali), penyebab konflik pun hanya dilihat sebagai kesalahan informasi yang menimbulkan pertengkaran antara suku. Identitas ini dimanfaatkan sebagai media identifikasi untuk memengaruhi emosi massa.

#### d) Trigger/Pemicu

Berdasarkan tiga kasus yang terjadi pada tahun 1980, pemicu terjadinya konflik yakni perkelahian antara pemuda etnis Bali dan Etnis Samawa serta banyaknya kasus kawin lari yang akhirnya menyudutkan etnis Bali. Pada kasus

tahun 2003 dan 2013, pemicu konflik yakni beredarnya informasi keliru yang menyebutkan pihak Polisi (berasal dari etnis Bali) menjadi pelaku penganiayaan pemuda dan mahasiswi dari etnis Samawa sehingga memantik emosi masyarakat dari etnis Samawa. Kasus pada tahun 2003 dan 2013 memiliki pola yang berulang yakni konflik dipicu akibat beredarnya berita atau informasi yang bersifat provokatif. Dalam kasus ini salah satu pihak yang berkonflik mendapat informasi yang keliru sehingga berdampak pada pengambilan tindakan-tindakan kekerasan.

#### e) Katalis

Pada periode pertama Konflik, penyebab konflik terlihat jelas yakni adanya faktor kesenjangan ekonomi dan sosial, namun ketika terjadi perkelahian antar pemuda dari kedua etnis, penyebab konflik pun berubah menjadi konflik antar suku. Terjadi pula bentrokan antara masyarakat dengan pihak kepolisian yang juga berpengaruh terhadap perubahan penyebab konflik dari setiap periode. Pada Periode konflik tahun 2003 dan 2013, pihak Polisi menjadi kambing-hitam atas kekeliruan berita yang beredar. Adanya provokasi masa karena pihak Polisi yang terlibat merupakan etnis Bali mendorong pihak lawan melakukan protes dengan kekerasan. Maka, katalis dalam konflik ini yakni adanya isu penganiayaan oleh pihak Polisi yang dikaitkan dengan sentimen etnis.

### 2.3 Penanganan Konflik Sosial Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2012

Konflik di Sumbawa terjadi dengan jarak waktu yang jauh antar periode konflik pertama ke periode konflik berikutnya, situasi ini menandakan bahwa pemerintah daerah mampu melakukan penyelesaian konflik dan menciptakan kondisi yang kondusif pasca konflik. Tetapi akar permasalahan konflik cenderung dibiarkan

sehingga apabila pemicu konflik muncul kembali, maka dapat menimbulkan konflik kekerasan yang lebih besar dari sebelumnya. Penulis menganalisa upaya penanganan konflik dengan mengacu pada periode terakhir terjadinya konflik di Sumbawa yakni pada tahun 2013, dimana pada periode ini konflik telah bereskalasi memasuki tahap ke delapan yaitu *fragmentation of the enemy*. Pada tahap ini, serangan langsung ditujukan pada inti kelompok lawan, dimaksudkan untuk menghancurkan musuh atau menghancurkan sistem vitalnya. Serangan semakin diintensifkan dan bertujuan untuk menghancurkan sistem-sistem penting dan dasar kekuatan pihak lain. Negosiator, perwakilan dan pemimpin akan menjadi target, dihancurkan legitimasi dan kekuatannya dalam kelompok mereka sendiri. Kelompok yang paling lemah akan tercerai berai, saling berkonflik sendiri sehingga membuat suasana semakin kacau (Glasl, 1999).

Konflik pada tahun 2013 bereskalasi dimulai saat isu pemerkosaan dan penganiayaan/pembunuhan terhadap Arniyati tersebar dan tidak bisa dibendung lagi. Provokasi ini tidak dapat dibendung dengan cepat oleh pemerintah setempat sehingga isu kecelakaan Arniyati dan I Gede Eka dikontroversikan menjadi isu pembunuhan. Selanjutnya terbentuklah penguatan identitas kelompok yang berakibat munculnya amarah masyarakat. Mereka melakukan aksi unjuk rasa di depan Polres Sumbawa dengan tujuan menuntut pengusutan kasus tersebut. Aksi ini tidak dengan cepat ditanggapi oleh pihak Kepolisian, sedangkan unjuk rasa sudah meningkat menjadi aksi kekerasan dengan bertambahnya jumlah massa. Pada kondisi ini serangan masyarakat dari suku Samawa semakin diintensifkan dan berujung pada tindakan kekerasan massal yang menargetkan masyarakat suku Bali dengan menghancurkan rumah mereka, tempat ibadah (Pura), satu unit toko dan dua swalayan juga dijarah dan

dibakar. Aksi kekerasan ini menimbulkan korban jiwa dan kerusakan materil. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan awal unjuk rasa sebagai bentuk pencarian kebenaran informasi dan penyelesaian kasus telah dilupakan dan berganti menjadi tujuan untuk menghancurkan lawan.

Penanganan konflik pada tahap ini dilakukan dengan intervensi kekuasaan, tokoh yang dapat dilibatkan diantaranya Polisi, Pemerintah Daerah maupun TNI. Penanganan model ini sejalan dengan pasal 12 Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa penghentian konflik dilakukan melalui tahap-tahap berikut :

Pertama, Penghentian Kekerasan Fisik yang dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Polri dan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau tokoh adat. Kasus konflik Sumbawa tahun 2013 ini bereskalasi pada tindakan kekerasan (*mass violence*) yang hanya dilakukan oleh salah satu pihak yang berkonflik dengan melakukan perusakan dan pembakaran sarana serta prasarana milik suku Bali. Pada tahap ini, ditangani dengan melakukan intervensi oleh Polisi bersama dengan tokoh masyarakat, namun kendala dalam konflik ini yaitu kurangnya keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama maupun tokoh adat dalam konflik di Sumbawa (Prihantoro & Hamidah, 2017), maka pihak Kepolisian berperan banyak untuk menghentikan kerusuhan dan menertibkan masyarakat, serta perlu adanya penegakan hukum bagi para pelaku kerusuhan/kekerasan.

Kedua, Penetapan Status Keadaan Konflik. Status Keadaan Konflik ditetapkan apabila konflik tidak dapat dikendalikan oleh Polri dan terganggunya fungsi pemerintahan. Konflik di Sumbawa ditetapkan sebagai status keadaan konflik skala kabupaten sehingga Bupati Sumbawa melaporkan kondisi konflik kepada Gubernur. Selain itu, dalam pasal 26 ayat d dinyatakan bahwa

Bupati/Wali Kota dapat melakukan pelarangan orang untuk memasuki kawasan konflik untuk sementara waktu. Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah daerah Sumbawa melakukan lokalisasi wilayah diantaranya dengan melarang masyarakat berkumpul lebih dari dua orang untuk menghindari penyebaran informasi profokatif; Pemda juga meminta bantuankoramil untuk berjaga-jaga di daerahperbatasan Luyuk untuk mencegah masuknya masyarakat di luar kabupaten Sumbawa yang akan mengikuti aksi demonstrasi; dan seluruh PNS turut dilibatkan dalam menjaga keamanan disekita area kampung Muslim yang berseberangan langsung dengan kampung Bali (Prihantoro & Hamidah, 2017).

Ketiga, Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan Korban dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Upaya ini dilakukan pemerintah dengan memfasilitasi tempat tinggal bagi pengungsi dari Suku Bali di tiga lokasi yakni di Markas Kodim Sumbawa, Markas Kompi Senapan B Batalyon Infanteri (Yonif) 742/SYB, dan di Markas Polres Sumbawa. Jumlah pengungsi yang ditampung sebanyak 80%. Selain itu, Pemerintah Daerah NTB juga berkontribusi dalam memberikan bantuan dana untuk membiayai kebutuhan pengungsi di Kodim dan di Polres (Prihantoro & Hamidah, 2017).

Keempat, bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI. Bantuan ini dilakukan setelah adanya penetapan status keadaan konflik serta dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemerintah dalam hal ini DPRD/DPR RI. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial, pemerintah dan pemerintah daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan pencegahan konflik, tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban, dengan mengerahkan bantuan dan kekuatan TNI. Pelibatan TNI dalam konflik sosial ini juga

tertuang pada UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dituliskan bahwa selain melaksanakan Operasi Militer Perang (OMP), TNI juga melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) diantaranya tugas perbantuan kepada Polri dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah – meliputi Komandan Satuan Teritorial yang ada di daerah – dapat mengambil keputusan tentang pengerahan TNI. Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI dilakukan untuk menghentikan kekerasan fisik, melaksanakan pembatasan, dan melakukan penutupan kawasan konflik untuk sementara waktu. Setelah ditetapkannya status keadaan konflik skala kabupaten, maka selanjutnya pemerintah daerah meminta persetujuan kepada DPRD untuk berkoordinasi dengan TNI. Pada konflik ini, pihak Polres Kabupaten Sumbawa yang terlebih dahulu mengajukan kepada pemerintah daerah agar dapat berkoordinasi dengan TNI dalam penanganan konflik sosial (Prihantoro & Hamidah, 2017). Pelibatan TNI berakhir setelah dilakukan pencabutan penetapan status keadaan konflik dan berakhirnya jangka waktu status keadaan konflik.

#### D. KESIMPULAN

Konflik sosial di Sumbawa terjadi dalam tiga periode dengan jarak yang cukup lama tetapi memiliki pola konflik yang sama. Dinamika konflik sosial di Sumbawa yang terjadi secara berulang mengalami eskalasi hingga pada tahap kerusakan masal (*fragmentation of the enemy*), kondisi ini menandakan bahwa pemerintah setempat hanya menyelesaikan konflik dipermukaan saja, sedangkan akar konflik tidak diselesaikan secara tuntas. Dilihat dari kerangka multi-causal role model, akar dari konflik antara etnis Samawa dan etnis Bali yakni adanya factor struktural dimana etnis Samawa kesulitan

mengakses sumber-sumber ekonomi serta tidak meratanya distribusi kekuasaan dalam pemerintahan. Pada akhirnya memunculkan kesenjangan sosial maupun ekonomi dimana salah satu kelompok lebih mendominasi dari kelompok lainnya. Ketidakmampuan dalam menangani akar konflik akan berdampak pada terulangnya konflik yang serupa dengan eskalasi yang meningkat, serta merubah alasan konflik dari waktu ke waktu sehingga mengaburkan faktor struktural yang menjadi penyebab sebenarnya dari konflik antar suku samawa dan suku bali.

Konflik yang sudah bereskalasi pada kerusakan masa ditangani dengan melakukan intervensi kekuasaan. Dalam hal ini pemerintah dapat melibatkan unsur TNI untuk membantu penyelamatan dan perlindungan korban serta untuk mencegah kembali terjadinya konflik, dengan tetap mengacu pada Undang-Undang No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Konflik sosial ini menjadi salah satu ancaman besar bagi kedaulatan negara karena dapat membahayakan keutuhan bangsa dan negara, hingga mengganggu stabilitas nasional. Oleh karenanya, perlu adanya sinergitas dalam upaya intervensiyang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, TNI, dan POLRI.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, S.I. (2010). Konflik Etnis Samawa dengan Etnis Bali: Tinjauan Sosial Politik dan Upaya Resolusi Konflik, FISIP Universitas Samawa Volume 23, Nomor 4
- Amrullah. (2018, Februari). Kecerdasan Budaya Dalam Proses Pencegahan dan Resolusi Konflik di Kabupaten Sumbawa, Jurnal Dialektika Volume 3, Nomor 1
- Glasl, F. (1999). *Confronting Conflict*. Bristol: Hawthorn Press.
- Iskandar, S, (2009, Juni). Resolusi Konflik Etnik Samawa dan Etnik Bali di Sumbawa. Populasi, 19(1) Volume 19 No.1.
- Kusumaputra, R.A, (2013, 22 Januari). Rusuh Sumbawa, Kesalahan yang Berulang. Dikutip

Kembali dari:<https://nasional.kompas.com/read/2013/01/22/21462023/Rusuh.Sumbawa.Kesalahan.yang.Berulang#:~:text=Pada%20tahun%202003%2C%2024%20September,akibat%20dianiaya%20berapa%20oknum%20polisi>.

- Liputan6, (2003, 23 september), Sumbawa Besar Rusuh. Dikutip dari: HYPERLINK "<https://www.liputan6.com/news/read/63194/sumbawa-besar-rusuh>"
- Mason, S., & Rychard, S. (2005). Conflict analysis tools. *Sdc, Copret*, 1-11.
- Muliono. (2020). Pola Perubahan, Wacana, Dan Tren Konflik Sosial Di Indonesia . *Al-Adyan: Journal of Religious Studies, Volume 1, Nomor 2, Desember*, 117-129.
- Prihantoro, M., & Hamidah, A. (2017). Implementasi Sistem Deteksi Dini dan Resolusi Konflik oleh Pemerintah Daerah dalam Menangani Konflik Sosial di Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus: Konflik Sosial antar Suku Samawa dan Suku Bali Tahun 2013). *Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik, Juni, Volume 3 Nomor 2*, 77-104.
- Rosarians, F. (2013, Januari 26). *Kontras: Konflik Sumbawa Liberalisasi Kerusakan*. Retrieved from nasional.tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/457121/kontras-konflik-sumbawa-liberalisasi-kerusakan>
- Salehuddin. (2016, April). DINAMIKA KONFLIK SOSIAL DI KOTA SUMBAWA. *Jurnal "Gema Kampus" Ilmu Administrasi Edisi Vol. XI April 2016*
- Tempo.co, (2003, 8 Oktober). Kapolres Sumbawa Diganti Akibat Kerusakan Tewaskan Satu Orang. Dikutip dari: <https://nasional.tempo.co/read/20613/kapolres-sumbawa-diganti-akibat-kerusakan-tewaskan-satu-orang>
- Tanpa nama, Kontras: Konflik Sumbawa Liberalisasi Kerusakan. Dikutip dari: HYPERLINK "<http://kontras.org/backup/home/index.php?module=berita&id=6107>"
- <http://kontras.org/backup/home/index.php?module=berita&id=6107>